

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MADIUN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



OLEH :

**TESALONIKA DEVVANY NUGROHO
NPM. 21041010013**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL, BUDAYA, DAN POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SURABAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MADIUN

Disusun oleh:

TESALONIKA DEVVANY NUGROHO
NPM. 21041010013

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Drs. Lukman Arif, M.Si
NIP.196411021994031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Dr. Catur Suratnoaji, M.Si
NIP. 196804182021211006

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MADIUN

Disusun oleh:

TESALONIKA DEVVANY NUGROHO

NPM. 21041010013

Telah diuji oleh Tim Penguji dan diterbitkan pada Jurnal Formosa Journal
of Multidisciplinary Research (Terakreditasi Copernicus), Vol. 4 No.9,
September 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING

Prof. Dr. Drs. Lukman Arif, M.Si
NIP.196411021994031001

TIM PENGUJI

1. Ketua

Bagus Nuari Harmawan, S.Sos., MPA.
NIP.199301252024061003

2. Sekretaris

Prof. Dr. Drs. Lukman Arif, M.Si
NIP. 196411021994031001

3. Anggota

Vidya Imanuari Pertiwi, S.AP., MPA.
NIP.199509122024062002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Dr. Catur Suratnoaji, M.Si
NIP. 196804182021211006

LEMBAR REVISI
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MADIUN

Disusun oleh:

TESALONIKA DEVVANY NUGROHO
NPM. 21041010013

Telah direvisi dan disahkan pada tanggal 8 September 2025

Menyetujui,

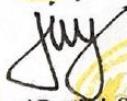
Dosen Pengaji 1

Dosen Pengaji 2

Dosen Pengaji 3


Bagus Nuari Harmawan, S.Sos., MPA.
NIP.199301252024061003


Prof. Dr. Drs. Lukman Arif, M.Si
NIP.196411021994031001


Vidya Imanuari Pertwi, S.AP., MPA.
NIP.199509122024062002

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tesalonika Devvany Nugroho
NPM : 21041010013
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Administrasi Publik.
Fakultas : Ilmu Sosial, Biudaya dan Politik

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disisipkan dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 10 September 2025
Yang membuat pernyataan



Tesalonika Devvany Nugroho
NPM. 21041010013

*pilih salah satu (lingkari)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya sehingga memberikan kelancaran, kekuatan sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Madiun”** dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Tanpa berkat dan kasih-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Penulis menyadari banyak pihak yang membantu juga berkontribusi dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Segala bentuk bantuan, baik berupa dukungan moril juga materil telah membantu penulis dalam mengumpulkan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Dr. Catur Saturnoaji, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Susi Hardjati, M.AP selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Prof. Dr. Drs. Lukman Arif, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, motivasi, saran dan arahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini;

5. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang memberikan ilmu, pengetahuan juga pengalaman semasa perkuliahan;
6. Seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, khususnya Bapak Sunardi Nurcahyo, S.STP., M.Si., Bapak Yanu Budhila Rto, S.STP., MM, Bapak Slamet, S.H, Bapak R. Adhi Angger H, S.Sos., Ibu Heter Hidayati, S.H. yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu memberikan informasi terkait penelitian penulis;
7. Alm. Bapak Tatok Nugroho Hari Mulyanto, S.E selaku ayah penulis yang senantiasa menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi. Segenap keluarga penulis, Ibu Ida Sulistyorini, S.Pd, AUD. dan Yoel Abimanyu Nugroho yang senantiasa mengiringi penulis dengan doa, memberikan motivasi, dukungan dan juga nasehat juga kepercayaan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Putri Angelica Gratia, Clara Elena Lintang Maharani, Rizky Putri Eswanto, Amanda Salsabila, Helena Desnita Adristi, Diana Safitri, Amalia Ramadhani, Jihan Putri, Mochammad Ilham dan Teman-teman Angkatan 2021 Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur selaku penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir:

Surabaya, 22 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR REVISI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Praktis	13
1.4.2 Manfaat Teoritis	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Landasan Teori	19
2.2.1 Peran.....	19
2.2.2.1 Definisi Peran.....	19
2.2.2.2 Peran Pemerintah	20
2.2.3 Satuan Polisi Pamong Praja	27
2.2.3.1 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	27
2.2.3.2 Tugas Dan Fungsi, Serta Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	29
2.2.4 Pedagang Kaki Lima	32
2.2.4.1 Penertiban Pedagang Kaki Lima	33
2.2.4.2 Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	35
2.2.5 Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	42

3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Fokus Penelitian.....	43
3.4 Sumber Data.....	45
3.5 Teknik Penentuan Informan	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Teknik Analisis Data	49
3.8 Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Objek	54
4.1.1 Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	54
4.1.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.....	55
4.1.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	56
4.1.4 Komposisi Pegawai.....	60
4.2 Hasil Penelitian	62
1. <i>Regulatory Role</i>	63
2. <i>Enabling Role</i>	72
3. <i>Direct Provision of Goods and Services</i>	85
4.3 Pembahasan.....	90
4.3.1 <i>Regulatory Role</i> (Perencana Kebijakan)	90
4.3.2 <i>Enabling Role</i> (Pelaksana Kebijakan).....	95
4.3.3 <i>Direct Provision of Goods and Services</i> (Pengawas Kebijakan)	101
BAB V PENUTUP.....	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pekerja Informal di Indonesia.....	2
Gambar 1.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Madiun	5
Gambar 1.3 Rekap Laporan Pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Tahun 2024.....	11
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	40
Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana, 2014	51
Gambar 4.1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun	56
Gambar 4.3 Standar Operasional Prosedur Penegakan Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	66
Gambar 4.4 Proses Penertiban Pedagang Kaki Lima di Satpol PP Kota Madiun.	71
Gambar 4.5 Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	74
Gambar 4.6 Barang Bukti Penyitaan Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	76
Gambar 4.7 Barang Bukti Peringatan Bagi Pedagang Kaki Lima	77
Gambar 4.8 Laporan Aduan Masyarakat Terkait Pelanggaran Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019	81
Gambar 4.9 Pemberian Teguran Lisan Kepada Pedagang Kaki Lima dan Edukasi Terkait Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Terbaru	17
Tabel 4.1 Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61
Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun Berdasarkan Pangkat Dan Golongan.....	62

ABSTRAK

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MADIUN

TESALONIKA DEVVANY NUGROHO

NPM. 21041010013

Pedagang kaki lima menjadi salah satu perhatian pemerintah terhadap struktur Peraturan Daerah, hal ini disebabkan banyaknya para pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar sebagai alternatif mencari penghasilan. Namun, di sisi lain, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di berbagai daerah kerap menjadi permasalahan yang terus berulang. PKL sering kali dianggap sebagai pihak yang menganggu ketertiban umum, sehingga menimbulkan stigma negative di kalangan masyarakat. Hal serupa juga dialami oleh Kota Madiun yang tidak bisa lepas dari keberadaan pedagang kaki lima. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran krusial sebagai perangkat daerah dengan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 255 Ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014. Namun dalam menjalankan perannya, masih ditemui pedagang kaki lima yang melanggar ketertiban meski telah dilakukan penertiban secara preventif oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Madiun dengan menggunakan teori Peran menurut Jones (1993) dalam Mahsun (2008) yang meliputi tiga variabel yakni: *regulatory role*, *enabling role*, dan *direct provision of goods and services*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun telah dilaksanakan dengan baik dalam hal *regulatory role*, kemudian masih terdapat hal yang perlu diperbaiki dalam *enabling role* juga *direct provision of goods and services*.

Kata Kunci: Peran; Satuan Polisi Pamong Praja; Penertiban; Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

THE ROLE OF PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN CONTROLLING STREET VENDORS IN MADIUN CITY

TESALONIKA DEVVANY NUGROHO
NPM. 21041010013

Street vendors are one of the government's concerns about the structure of Local Regulations, this is due to the large number of street vendors, especially in big cities as an alternative to earning income. However, on the other hand, the existence of street vendors (PKL) in various regions is often a recurring problem. Street vendors are often considered as parties that disturb public order, thus creating a negative stigma among the community. This is also experienced by Madiun City, which cannot be separated from the existence of street vendors. The Pamong Praja Police Unit has a crucial role as a regional apparatus with its function. However, in carrying out its role, there are still street vendors who violate order even though the Pamong Praja Police Unit has carried out preventive control. This study aims to determine the role of the Pamong Praja Police Unit in controlling street vendors in Madiun City using the Role theory according to Jones (1993) in Mahsun (2008) which includes three variables namely: regulatory role, enabling role, and direct provision of goods and services. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results of the study show that the role of the Madiun City Civil Service Police Unit has been carried out well in terms of its regulatory role, but there are still areas that need improvement in terms of its enabling role and direct provision of goods and services.

Keywords: *Role; Pamong Praja Police Unit; Policing; Street Food Vendors*